



APBD Pontianak 2022 Rp 1,87 T

Wako: Belanja Pegawai Sesuai Permendagri

PONTIANAK, TRIBUN - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp 1,87 triliun sudah disetujui oleh DPRD Kota Pontianak Kalimantan Barat. Hal itu, Edi sampaikan saat rapat paripurna pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (23/11).

Menurut Edi, skenario perbandingan antara belanja pegawai, modal dan barang dan jasa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Adapun rincian Rancangan APBD tahun 2022 yang telah disepakati. Di antaranya adalah pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 1,80 triliun, belanja daerah Rp 1,82 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 68,55 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 59,5 miliar.

Terjadi dinamika terhadap target pendapatan daerah. Baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan

Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak



IST PARIPURNA
- Wali Kota Pontianak menandatangani berita acara penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, kemarin.

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak," ujarnya. Salah satu upaya yang dilakukan tersebut, di antaranya ialah berkoordinasi dengan pihak hotel terdekat yaitu Hotel Neo dan tempat ibadah terdekat. "Nanti kita juga akan melakukan revitalisasi SDM itu. Kemudian kita juga akan memudahkan kepada pihak hotel dengan me-

lakukan sistem prabayar. Jadi kendaraan tamu hotel yang datang itu, maka hotel yang membayar biaya parkir ke kita," ujarnya. Sistem yang dilakukan adalah dengan meminta setiap kendaraan yang masuk sehingga nantinya pihak hotel membayar perbulan kepada pemkot melalui Dishub. Sejauh ini, pengelolaan yang dilaku-

kan ialah pengendara langsung bayar dan diakuinya banyak yang keberatan. "Kemudian juga, masih diberi ruang parkir di pinggir jalan. Maka nanti tidak boleh lagi parkir di pinggir jalan," ungkapnya. Dishub kata dia, akan terus mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan gedung parkir tersebut sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak.

"Dalam rancangan APBD Tahun 2022, telah terjadi dinamika terhadap target pendapatan daerah. Baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap target belanja daerah serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah," ujarnya. Wako Edi, juga menyampaikan apresiasinya kepada

jajaran DPRD Kota Pontianak yang telah sepakat menyetujui raperda tersebut untuk dituangkan menjadi Perda.

"Mudah-mudahan dengan telah disepakatinya Raperda APBD Tahun 2022 ini untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar termasuk pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri," ucapnya.

Dishub Target Rp 1 M Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi menyampaikan, bahwa pihaknya terus melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan gedung parkir yang terletak di Jalan Suprpto Pontianak Kalimantan Barat. "Optimalisasi pasti kita lakukan untuk meningkatkan

"Dalam setahun terakhir ini pendapatan di gedung parkir Rp 500 juta, karena pandemi banyak pembatasan-pembatasan. Maka untuk tahun depan ditargetkan bisa lebih dari Rp 1 miliar karena kegiatan ekonomi saat ini sudah mulai aktif kembali," pungkasnya. **(oki)**